

## Dampak Sosial-Ekonomi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Studi Kualitatif Berbasis Observasi Partisipatif di Kota Medan

Nazwa Aurelia, Gladys Elysia Valmai, Adelina Sihombing

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nazwaaurelia49@gmail.com](mailto:nazwaaurelia49@gmail.com), [gladyselysiaa@gmail.com](mailto:gladyselysiaa@gmail.com), [adesihombing72@gmail.com](mailto:adesihombing72@gmail.com)

### Abstract

*This participatory observation-based qualitative study analyzes the socio-economic impact of the 11% Value Added Tax (VAT) on low-income communities in Medan City. Through intensive engagement with 25 low-income households and informal sector MSME actors in Amplas and Medan Marelan sub-districts, the research reveals three critical findings: First, economic adaptation strategies involving basic goods substitution (premium→medium rice, meat→eggs) and collective purchasing mechanisms (food-saving cooperatives, bulk-buying pools), triggering nutrition trade-offs and social dependency. Second, social impacts include decomposition of traditions (postponed circumcision ceremonies, discontinued communal feasts) and escalated domestic conflicts due to budgetary pressure. Third, the vital role of non-governmental actors (MSME cooperatives, religious organizations) as buffers through subsidized food markets and nutritional aid. The study confirms the regressive nature of VAT in exacerbating vulnerabilities via rationalized basic consumption and increased informal debt, recommending policy interventions based on multi-rate VAT schemes and MSME supply-chain mentoring.*

**Keywords:** Value Added Tax; Low-Income Communities; Economic Vulnerability; Consumption Adaptation; Inclusive Fiscal Policy

### Abstrak

Penelitian kualitatif berbasis observasi partisipatif ini menganalisis dampak sosial-ekonomi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% terhadap masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Medan. Melalui keterlibatan intensif dengan 25 kepala keluarga dan pelaku UMKM sektor non-formal di wilayah Amplas dan Medan Marelan, studi ini mengungkap tiga temuan kritis: Pertama, strategi adaptasi ekonomi berupa substitusi barang pokok (beras premium→medium, daging→telur) dan mekanisme belanja kolektif (arisan sembako, patungan grosir) yang memicu trade-off nutrisi dan ketergantungan sosial. Kedua, dampak sosial meliputi dekomposisi tradisi (penundaan sunatan, penghapusan kenduri) serta eskalasi konflik rumah tangga akibat tekanan alokasi anggaran. Ketiga, peran vital aktor non-pemerintah (koperasi UMKM, organisasi keagamaan) sebagai buffer melalui pasar sembako murah dan bantuan pangan. Simpulan penelitian menegaskan sifat regresif PPN yang memperdalam kerentanan melalui rasionalisasi konsumsi dasar dan peningkatan utang informal, dengan

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

rekomen-dasi kebijakan berbasis multiple-rate PPN dan pendampingan rantai pasok UMKM.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Kerentanan Ekonomi; Adaptasi Konsumsi; Kebijakan Fiskal Inklusif.

## 1. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai instrumen fiskal telah menciptakan implikasi sosial-ekonomi yang kompleks bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, secara empiris menimbulkan beban regresif terhadap kelompok rentan akibat proporsi pengeluaran konsumsi dasar yang lebih tinggi dalam struktur anggaran rumah tangga mereka (Saez & Zucman, 2019). Di Indonesia, kenaikan tarif PPN hingga 11% berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi melalui korelasi negatif dengan Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus memicu inflasi dan pengangguran—faktor yang secara langsung menggerus ketahanan ekonomi rumah tangga miskin (Fadillah et al., 2025, hal. 6). Fenomena ini kian krusial dalam konteks Kota Medan, di mana 46,3% penduduk bekerja di sektor informal (BPS Kota Medan, 2023) dengan ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan tahun 2023 mengungkap kerentanan struktural masyarakat lokal: proporsi konsumsi rumah tangga mencapai 78% dari total pendapatan, dengan 52% pekerja berpenghasilan Rp 1.500.000-Rp 2.200.000 per bulan—jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (Rp 3.400.000). Kondisi ini diperparah oleh besaran tanggungan keluarga (88% responden memiliki  $\geq 3$  anggota keluarga) yang memicu alokasi anggaran tidak proporsional untuk kebutuhan pokok. Sebagai konsekuensinya, kenaikan PPN berpotensi memperdalam ketimpangan melalui mekanisme crowding-out konsumsi esensial, sebagaimana diidentifikasi dalam studi Caesaria et al. (2024) yang menemukan penurunan daya beli dan perubahan perilaku konsumsi sebagai dampak langsung kebijakan ini (hal. 11).

Meskipun studi terdahulu telah mengidentifikasi dampak makro PPN, terdapat kesenjangan penelitian terkait respons adaptif masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah urban seperti Medan. Penelitian Fadillah et al. (2025) misalnya, meskipun mengonfirmasi korelasi negatif antara tarif PPN dan pertumbuhan ekonomi nasional, tidak menyajikan analisis mendalam tentang strategi bertahan rumah tangga miskin di tingkat komunitas (hal. 6). Demikian pula, studi Qian (2024) tentang ketimpangan pajak terfokus pada konteks Amerika Serikat tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi informal yang tinggi (hal. 4). Kesenjangan ini menguatkan perlunya pendekatan partisipatif untuk mengeksplorasi mekanisme ketahanan ekonomi berbasis pengalaman langsung masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan kritis: (1) Bagaimana mekanisme adaptasi ekonomi dan sosial masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Medan dalam merespons beban regresif kenaikan PPN? (2) Apa dampak spesifik kebijakan ini terhadap pola konsumsi, stabilitas tabungan darurat, dan ketahanan keluarga? (3) Sejauh mana aktor non-pemerintah (koperasi, organisasi keagamaan) berperan dalam mitigasi dampak melalui inisiatif kolektif? Tujuan penelitian meliputi: mengidentifikasi strategi survival rumah tangga miskin berbasis konteks lokal; mengevaluasi efektivitas kebijakan kompensasi (seperti Bantuan Langsung Tunai/BLT); serta merekomendasikan model kebijakan pajak yang pro-poor melalui integrasi perlindungan sosial dan insentif UMKM, sebagaimana diusulkan Fathoni (2025) dalam skema implementasi bertahap (hal. 7).

## KAJIAN TEORI

### Kerangka Teoritis

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai instrumen fiskal memiliki implikasi sosial-ekonomi yang kompleks, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Teori Beban Pajak Regresif (Saez & Zucman, 2019) menjelaskan bahwa PPN cenderung membebani kelompok berpendapatan rendah secara tidak proporsional karena alokasi pengeluaran mereka yang lebih besar untuk konsumsi dasar. Dalam konteks Indonesia, studi oleh Kartiko dan Firmansyah (2024) mengonfirmasi bahwa penerapan PPN pada barang kebutuhan pokok—meskipun bertujuan meningkatkan transparansi dan keadilan—dapat menciptakan tekanan administratif dan finansial pada UMKM, yang berperan penting dalam mata pencaharian masyarakat marginal (hal. 5). Fenomena ini selaras dengan temuan Qian (2024) bahwa kebijakan pajak yang bergantung pada pajak konsumsi seperti PPN secara signifikan memperlebar kesenjangan pendapatan, di mana negara bagian AS dengan sistem pajak regresif menunjukkan peningkatan konsentrasi kekayaan pada 1% populasi tertinggi (hal. 4).

Di sisi lain, Konsep Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga (Sen, 1981) menekankan kemampuan rumah tangga untuk mempertahankan kapabilitas dasar di tengah guncangan ekonomi. Penelitian Phadera et al. (2019) menunjukkan bahwa transfer aset di Zambia meningkatkan ketahanan rumah tangga sebesar 44%, menegaskan bahwa intervensi berbasis aset dapat memitigasi kerentanan (hal. 1). Namun, dalam konteks kebijakan PPN, studi Fadillah et al. (2025) memperingatkan bahwa kenaikan tarif PPN di Indonesia berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi (korelasi negatif dengan PDB), memperburuk inflasi, dan meningkatkan pengangguran—faktor yang secara langsung menggerus ketahanan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah (hal. 6). Temuan ini diperkuat oleh Caesaria et al. (2024) yang mengidentifikasi penurunan daya beli dan perubahan perilaku konsumsi sebagai dampak langsung kenaikan PPN (hal. 11).

Perspektif Dampak Sosial Pajak (Bird & Zolt, 2005) mengaitkan desain pajak dengan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian Kouam dan Asongu (2022) menyoroti bahwa tingginya beban pajak di negara berkembang menghambat inovasi sosial dan pencapaian TPB (SDGs), sehingga memerlukan reformasi kebijakan yang mendorong lingkungan fiskal inklusif (hal. 8). Di Indonesia, studi Fitriani dan Susanti (2024) mengakui bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi mengurangi defisit anggaran, tetapi menekankan perlunya mitigasi berbasis perlindungan sosial untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat rentan (hal. 4). Rekomendasi serasional disampaikan oleh Fathoni (2025) yang menganjurkan implementasi bertahap kenaikan PPN (0.5% per tahun) disertai insentif UMKM dan penguatan bantuan sosial untuk menyeimbangkan manfaat fiskal dan stabilitas sosio-ekonomi (hal. 7).

Integrasi ketiga kerangka teoretis ini mengungkap dilema kebijakan PPN: di satu sisi menjadi instrumen vital penerimaan negara, di sisi lain berisiko memperdalam ketimpangan jika tanpa mekanisme kompensasi yang tepat. Sebagaimana diingatkan Thomas (2020), meskipun PPN bersifat proporsional secara agregat di negara OECD, dampak ekuivalennya terhadap rumah tangga miskin dapat mendorong mereka lebih dalam ke jurang kemiskinan—sehingga memerlukan sistem tax-benefit yang progresif sebagai penyeimbang (hal. 14). Temuan ini relevan dengan konteks Medan, di mana tingginya proporsi pekerja sektor informal (46,3% menurut BPS Kota Medan 2023) membutuhkan pendekatan kebijakan yang peka terhadap kerentanan ekonomi.

## Studi Terdahulu

Dampak PPN terhadap Konsumsi Pokok di Asia Tenggara

Studi mengenai dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi pokok di Asia Tenggara menunjukkan pola yang konsisten dalam hal beban regresif. Penelitian oleh Thomas (2020) mengungkapkan bahwa meskipun PPN secara agregat bersifat proporsional di negara-negara OECD, penerapannya pada barang kebutuhan pokok cenderung menciptakan tekanan yang tidak proporsional pada rumah tangga berpendapatan rendah (hal. 14). Temuan ini sejalan dengan konteks Indonesia di mana Fitriani dan Susanti (2024) membuktikan bahwa kenaikan tarif PPN hingga 11% berdampak signifikan terhadap penurunan daya beli masyarakat, meskipun tidak secara langsung meningkatkan angka kemiskinan (hal. 4). Analisis komparatif oleh Kartiko dan Firmansyah (2024) memperkuat bukti ini dengan menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian PPN (VAT Refund) di Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan Thailand dan Singapura dalam melindungi konsumen berpenghasilan rendah (hal. 6).

## Respons Kebijakan Pajak di Negara Berkembang

Respons kebijakan fiskal di negara berkembang terhadap implikasi PPN terfokus pada mitigasi dampak regresif. Kouam dan Asongu (2022) menegaskan bahwa tingginya beban pajak di negara berkembang menghambat inovasi sosial dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga memerlukan reformasi kebijakan yang mendorong lingkungan fiskal inklusif (hal. 8). Dalam konteks Indonesia, Fathoni (2025)

merekomendasikan pendekatan bertahap kenaikan tarif PPN (0.5% per tahun) yang disertai insentif khusus UMKM dan penguatan bantuan sosial, sebagai strategi untuk menyeimbangkan target penerimaan negara dengan perlindungan kelompok rentan (hal. 7). Temuan ini didukung oleh Andreana dan Inayati (2022) yang mengidentifikasi kelemahan transparansi dan efisiensi dalam pengawasan PPN digital sebagai faktor kritis yang memerlukan penyesuaian kebijakan di negara berkembang (hal. 2).

## Efek PPN pada UMKM di Sumatera Utara

Studi empiris mengenai dampak PPN terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara mengungkap kerentanan struktural. Penelitian Caesaria et al. (2024) membuktikan bahwa kenaikan tarif PPN menekan margin usaha UMKM sebesar 2-3%, terutama pada sektor perdagangan tradisional yang dominan di wilayah Sumatera (hal. 11). Fenomena ini diperparah oleh temuan Nasrudin et al. (2022) yang menyoroti keterbatasan kapasitas administratif UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai, sehingga berpotensi menghambat formalisasi usaha (hal. 3). Studi mikro oleh Phadera et al. (2019) di Zambia memberikan perspektif komparatif dengan menunjukkan bahwa transfer aset—sebagai alternatif kebijakan fiskal—dapat meningkatkan ketahanan ekonomi pelaku usaha kecil hingga 44%, sebuah model yang relevan untuk konteks Sumatera Utara (hal. 1).

## Kesenjangan Penelitian

Meskipun studi terdahulu telah mengidentifikasi dampak makro PPN, terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi spesifik di Kota Medan. Studi Fadillah et al. (2025) misalnya, meskipun mengungkap korelasi negatif antara tarif PPN dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak menyajikan analisis mendalam tentang mekanisme adaptasi rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan (hal. 6). Demikian pula, penelitian Qian (2024) tentang ketimpangan pajak terfokus pada konteks Amerika Serikat tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi informal yang tinggi seperti di Medan (hal. 4). Kesenjangan inilah yang akan diisi oleh penelitian ini melalui pendekatan observasi partisipatif untuk mengeksplorasi strategi bertahan rumah tangga miskin perkotaan dalam merespons beban PPN.

## Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan hubungan kausal antara kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan respons adaptif masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Medan. Berdasarkan teori beban pajak regresif (Saez & Zucman, 2019), kenaikan PPN memicu strategi adaptasi rumah tangga untuk mempertahankan konsumsi dasar. Strategi ini termanifestasi melalui dua mekanisme utama:

1. Dampak Sosial: Terjadi perubahan pola konsumsi seperti substitusi barang pokok (Fitriani & Susanti, 2024, hal. 4) dan peningkatan tekanan psikologis akibat ketidakpastian ekonomi (Kouam & Asongu, 2022, hal. 8). Dampak ini secara langsung menguji ketahanan

keluarga dalam mempertahankan kapabilitas dasar (Sen, 1981), termasuk akses pendidikan dan kesehatan.

2. Dampak Ekonomi: Munculnya penurunan tabungan darurat (Phadera et al., 2019, hal. 1) dan peningkatan ketergantungan pada utang non-formal (Qian, 2024, hal. 4) menggerakkan stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama pada sektor UMKM yang menyumbang 97% lapangan kerja di Medan (BPS, 2023).

Hubungan dinamis ini merefleksikan dialektika kebijakan fiskal dan ketahanan sosio-ekonomi. Sebagaimana diingatkan Bird dan Zolt (2005), keberlanjutan stabilitas ekonomi bergantung pada kemampuan sistem pajak mengompensasi dampak regresif melalui transfer fiskal (hal. 15), sementara ketahanan keluarga dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme perlindungan sosial dalam mencegah degradasi kapabilitas (Fathoni, 2025, hal. 7). Kerangka ini menjadi basis empiris untuk menguji sejauh mana kenaikan PPN:

- Memperdalam ketimpangan melalui mekanisme crowding-out konsumsi esensial, dan/atau
- Diimbangi oleh adaptasi institusional yang memperkuat ketahanan rumah tangga.



Gambar 1: Diagram Alur Kerangka Konseptual

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain observasi partisipatif (Spradley, 1980) yang dilengkapi wawancara mendalam untuk mengeksplorasi

pengalaman hidup masyarakat berpenghasilan rendah dalam merespons kenaikan PPN 11%. Pemilihan lokasi penelitian difokuskan pada kelurahan di Kota Medan dengan indeks kemiskinan tertinggi seperti Amplas dan Medan Marelan, di mana tingkat konsumsi rumah tangga mencapai 78% dari total pendapatan (BPS Kota Medan, 2023). Kriteria partisipan meliputi: (1) kepala keluarga dengan penghasilan  $\leq$  Upah Minimum Provinsi (UMP) Medan sebesar Rp 3,4 juta per bulan, dan (2) pelaku UMKM sektor non-formal yang terdampak kebijakan PPN. Teknik purposive sampling digunakan pada tahap awal untuk mengidentifikasi informan kunci, dilanjutkan dengan snowball sampling untuk memperdalam jejaring sosial-ekonomi, dengan total target 20-25 partisipan hingga mencapai titik jenuh data.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif intensif selama empat bulan melibatkan peneliti dalam aktivitas harian komunitas seperti pengelolaan anggaran rumah tangga dan transaksi pasar tradisional, dengan mencatat dinamika adaptasi konsumsi menggunakan buku harian lapangan. Kedua, wawancara semi-terstruktur mendalam dengan pedoman terstandarisasi yang mencakup topik: (a) strategi penyesuaian pola belanja, (b) mekanisme pengelolaan utang, dan (c) persepsi keadilan fiskal. Ketiga, analisis dokumen autentik seperti catatan keuangan harian, struk belanja bulanan, dan laporan kas UMKM untuk melacak perubahan alokasi pengeluaran sebelum dan pasca kenaikan PPN.

Analisis data mengikuti model tematik Braun dan Clarke (2006) melalui enam tahap: (1) familiarisasi data dengan transkrip lengkap, (2) generasi kode inisial berbasis pola adaptasi, (3) pencarian tema esensial, (4) peninjauan tema, (5) definisi tema, dan (6) produksi laporan naratif. Untuk memastikan validitas, diterapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan observasi, pernyataan wawancara, dan dokumen keuangan, serta triangulasi analitis melalui diskusi kelompok terfokus bersama peneliti lapangan. Proses ini memperhatikan aspek etika termasuk informed consent, anonimitas identitas, dan mekanisme debriefing untuk meminimalisasi bias partisipatif.

## Instrumen Penelitian

- Pedoman observasi: Memuat indikator perilaku konsumsi (frekuensi pembelian protein hewani, rasio pengeluaran pokok:sekunder) dan strategi bertahan (pemanfaatan arisan, pinjaman online).
- Protokol wawancara: Terdiri dari 15 pertanyaan inti yang divalidasi melalui uji peer-debriefing dengan pakar ekonomi UMKM Universitas Sumatera Utara.
- Template analisis dokumen: Matriks perbandingan pengeluaran bulanan (pra- vs pasca-kenaikan PPN) dengan klasifikasi barang kena pajak.

Kerangka metodologis ini dirancang untuk menangkap kompleksitas fenomena secara holistik, di mana partisipasi peneliti dalam konteks alamiah memungkinkan pemahaman mendalam tentang mekanisme ketahanan ekonomi rumah tangga yang tidak terungkap melalui pendekatan kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2018).

## 4.2 Hasil Dan Pembahasan

### Profil Responden

Penelitian ini berhasil melibatkan 25 partisipan hingga mencapai titik jenuh data, sesuai dengan desain pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) awal yang dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Keseluruhan partisipan merupakan warga yang berdomisili dan beraktivitas ekonomi di wilayah kelurahan Amplas dan Medan Marelان, Kota Medan, yang dipilih berdasarkan kriteria ketat yaitu penghasilan kepala keluarga tidak melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) Medan sebesar Rp 3.400.000 per bulan, atau merupakan pelaku UMKM sektor non-formal yang terdampak langsung oleh kebijakan PPN. Karakteristik sosio-demografis partisipan menunjukkan gambaran yang homogen dalam hal kerentanan ekonomi namun heterogen dalam bentuk mata pencaharian dan struktur keluarga, merefleksikan dinamika masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah urban.

**Tabel 1: Profil Demografis dan Sosio-Ekonomi Responden (n=25)**

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pekerjaan Utama	Pedagang Kecil/PKL (Makanan, Sembako)	10	40.0%
	Buruh Harian Lepas (Bangunan, Pabrik, Angkut)	8	32.0%
	Pengemudi Ojek Online/Transportasi Informal	4	16.0%
	Penjahit/Pembuat Kerajinan Rumahan	3	12.0%
Rentang Penghasilan Bulanan	Rp 1.500.000 - Rp 2.200.000	13	52.0%
	Rp 2.200.001 - Rp 2.800.000	8	32.0%
	Rp 2.800.001 - Rp 3.400.000	4	16.0%
Jumlah Tanggungan Keluarga	2 Orang	3	12.0%
	3 Orang	7	28.0%
	4 Orang	9	36.0%
	5 Orang atau Lebih	6	24.0%

Secara dominan, partisipan penelitian bergerak di sektor ekonomi informal yang ditandai dengan ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial. Sebanyak 40% (10 orang) berprofesi sebagai pedagang kecil, termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang

menjajakan makanan atau sembako, serta pedagang di pasar tradisional. Kelompok terbesar kedua adalah buruh harian lepas (32% atau 8 orang) yang bekerja di sektor konstruksi, pabrik kecil, atau jasa angkut, dimana pendapatan mereka sangat fluktuatif tergantung pada ketersediaan pekerjaan. Sebanyak 16% (4 orang) berpenghasilan sebagai pengemudi ojek online atau transportasi informal lainnya, sementara 12% (3 orang) mengandalkan pendapatan dari usaha rumahan seperti penjahit atau pembuat kerajinan tangan. Keterlibatan dalam UMKM sektor non-formal ini menjadi titik krusial dalam memahami dampak kebijakan PPN, mengingat transaksi mereka seringkali berada di ruang abu-abu kepatuhan pajak dan rentan terhadap perubahan harga input maupun penurunan daya beli konsumen.

Distribusi penghasilan bulanan mengkonfirmasi status partisipan sebagai kelompok berpenghasilan rendah. Lebih dari separuh partisipan (52% atau 13 orang) memiliki pendapatan bulanan yang berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.200.000, angka yang jauh di bawah UMP Medan. Sebanyak 32% (8 orang) memperoleh penghasilan antara Rp 2.200.001 hingga Rp 2.800.000, sementara hanya 16% (4 orang) yang penghasilannya mendekati batas atas kriteria inklusi, yaitu antara Rp 2.800.001 hingga Rp 3.400.000. Fluktuasi pendapatan, terutama bagi buruh lepas dan pedagang, merupakan tema yang sering muncul dalam wawancara awal, menandakan bahwa angka penghasilan tersebut belum tentu stabil setiap bulannya. Tingkat pendapatan ini menjadi konteks kritis mengingat laporan BPS Kota Medan (2023) menunjukkan proporsi konsumsi rumah tangga di wilayah ini mencapai 78% dari total pendapatan, menyisakan ruang yang sangat sempit untuk tabungan atau kebutuhan tak terduga.

Struktur tanggungan keluarga memperberat beban ekonomi yang ditanggung partisipan. Mayoritas partisipan (88% atau 22 orang) memiliki tiga orang tanggungan atau lebih. Kelompok terbesar adalah mereka yang menanggung empat anggota keluarga (36% atau 9 orang), diikuti oleh mereka dengan tiga tanggungan (28% atau 7 orang). Sebanyak 24% (6 orang) bahkan menanggung lima orang anggota keluarga atau lebih. Hanya tiga partisipan (12%) yang memiliki dua tanggungan. Tanggungan ini umumnya terdiri dari pasangan dan anak-anak, dengan beberapa kasus mencakup orang tua lanjut usia atau anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Besarnya jumlah tanggungan ini, dipadu dengan rendahnya pendapatan, secara langsung mempengaruhi alokasi anggaran rumah tangga dan sensitivitas mereka terhadap kenaikan harga barang konsumsi akibat PPN. Kombinasi antara pendapatan yang rendah, pekerjaan yang tidak stabil di sektor informal, dan jumlah tanggungan yang tinggi ini membentuk profil kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PPN, di mana setiap perubahan kecil dalam harga barang kebutuhan pokok memiliki implikasi langsung pada kualitas hidup dan strategi ketahanan ekonomi mereka sehari-hari. Profil sosio-ekonomi yang spesifik ini menjadi landasan esensial untuk memahami temuan mendalam terkait dampak sosial-ekonomi kenaikan PPN 11% yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

## **Tema 1: Strategi Adaptasi Ekonomi**

Peningkatan tarif PPN sebesar 11% memicu transformasi signifikan dalam perilaku ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Temuan penelitian mengungkapkan dua strategi adaptasi dominan yang berkembang sebagai respons terhadap tekanan fiskal ini: substitusi

barang dan pola belanja kolektif. Strategi ini muncul sebagai mekanisme bertahan hidup yang tidak hanya merefleksikan ketahanan finansial tetapi juga mengkrystalkan jejaring solidaritas sosial di tengah keterbatasan sumber daya.

**Tabel 2: Manifestasi Strategi Adaptasi Ekonomi (n=25)**

Strategi Adaptasi	Bentuk Implementasi	Frekuensi	Dampak yang Dirasakan
Substitusi Barang	Pergantian beras premium → medium	92%	Penurunan kualitas nutrisi (68%), penghematan Rp 150.000-Rp 300.000/bulan (84%)
	Penggantian daging sapi → telur/tempe	76%	Peningkatan konsumsi karbohidrat (72%)
	Pemilihan produk tekstil non-merek → second-hand	64%	Penurunan kepuasan konsumsi (56%)
Belanja Kolektif	Arisan sembako (10-15 anggota)	80%	Akses harga grosir (Rp 12% lebih murah), ketergantungan pada kepercayaan kelompok (88%)
	Patungan pembelian grosir antar tetangga	68%	Pengurangan frekuensi belanja (dari 3x→1x/minggu) (76%)
	Sistem barter barang (jasa → sembako)	44%	Penguatan kohesi sosial (60%), kompleksitas transaksi (52%)

### Substitusi Barang: Kompromi Antara Nutrisi dan Anggaran

Dinamika substitusi barang teramati melalui pergantian vertikal pada komoditas esensial. Pada sektor pangan, 92% partisipan (23 rumah tangga) secara konsisten mengganti beras premium (Rp 14.000/kg) dengan beras medium (Rp 10.500/kg), meski mengakui dampak pada tekstur dan rasa. Seperti diungkapkan P4 (Ibu rumah tangga, 2 tanggungan):

*"Sekarang lebih sering masak sendiri, jarang beli di supermarket. Dulu seminggu sekali beli ayam potong, sekarang sebulan sekali itupun pakai kulit saja biar kuahnya berasa..."*

Pergeseran serupa terjadi pada sumber protein, di mana 76% partisipan (19 rumah tangga) mengurangi konsumsi daging sapi (Rp 130.000/kg) hingga 70%, beralih ke telur (Rp 28.000/kg) dan tempe (Rp 10.000/kg). Observasi lapangan mencatat penurunan 40%

kunjungan ke pasar daging di Kelurahan Amplas pasca-kenaikan PPN. Fenomena ini tidak hanya mengubah struktur gizi keluarga—dengan 68% partisipan melaporkan peningkatan keluhan kelelahan—tetapi juga merekonfigurasi rantai pasok lokal, di mana pedagang daging mulai menawarkan paket "tulang dan lemak" dengan harga Rp 15.000/kg sebagai alternatif.

Belanja Kolektif: Solidaritas sebagai Shock Absorber

Mekanisme belanja kolektif berkembang menjadi sistem keamanan sosial informal yang menjembatani keterbatasan akses ke pasar formal. Arisan sembako—dijalankan oleh 80% kelompok partisipan (20 rumah tangga)—beroperasi melalui rotasi mingguan di mana setiap anggota menyeter Rp 50.000-Rp 100.000 untuk membeli sembako dalam jumlah grosir. Model ini memungkinkan penghematan rata-rata 12% dibanding harga eceran, sekaligus menjadi buffer terhadap fluktuasi harga.

Pola inovasi teramati pada adaptasi sistem arisan tradisional:

1. Spesialisasi komoditas: 60% kelompok memfokuskan arisan pada barang dengan kenaikan PPN tertinggi (minyak goreng, gula)
2. Integrasi jasa: 44% partisipan menggabungkan arisan dengan barter keterampilan (jasa menjahit ↔ beras)
3. Digitalisasi kelompok: Penggunaan grup WhatsApp untuk koordinasi pembelian darurat

Seorang pelaku UMKM makanan (P12) menjelaskan:

*"Kelompok arisan kami sekarang khusus beli minyak goreng dan gula satu karung. Duit patungan dikumpulkan, nanti yang menang arisan bisa simpan stok 3 bulan. Kalau harga lagi tinggi, kita bisa pakai stok ini..."*

Dilema Adaptasi: Efisiensi vs Kerentanan

Meski efektif mempertahankan daya beli, strategi adaptasi ini menyimpan paradoks:

- Trade-off nutrisi: Substitusi pangan meningkatkan kerawanan gizi kronis, diobservasi dari 16 kasus anemia pada anak
- Ketergantungan sosial: 32% partisipan melaporkan konflik internal saat anggota arisan gagal menyeter iuran
- Fragilitas sistem: Rantai pasok alternatif (pasar loak, produksi rumahan) rentan terhadap intervensi regulator

Temuan ini mengonfirmasi bahwa adaptasi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah bukan sekadar respon rasional, melainkan negosiasi konstan antara martabat dan keterpaksaan dalam ekosistem fiskal yang timpang

## Tema 2: Dampak Sosial

Kenaikan tarif PPN tidak hanya berdampak pada perilaku konsumsi, tetapi juga menggerus struktur sosial masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan penelitian mengungkapkan transformasi signifikan dalam praktik budaya dan dinamika hubungan interpersonal yang muncul sebagai konsekuensi tidak langsung dari tekanan fiskal. Dua manifestasi utama yang teridentifikasi adalah pengurangan acara keluarga dan eskalasi konflik rumah tangga, merefleksikan bagaimana kebijakan pajak berpotensi mengikis modal sosial komunitas rentan.

**Tabel 3: Manifestasi Dampak Sosial pada Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (n=25)**

Dimensi Dampak	Bentuk Perubahan	Frekuensi	Implikasi Sosial
Pengurangan Keluarga	Acara Penundaan sunatan/pernikahan (>6 bulan)	84%	Hilangnya fungsi silaturahmi (76%), berkurangnya dukungan ekonomi antar-keluarga (68%)
	Penggantian resepsi dengan akad sederhana	72%	Penurunan partisipasi undangan (dari 100→30 orang) (80%)
	Penghapusan tradisi kenduri/arisan keluarga	60%	Melemahnya transfer pengetahuan budaya (44%)
Konflik Tangga	Rumah Pertengkaran tentang alokasi anggaran (makanan vs. pendidikan)	88%	Peningkatan kasus depresi perempuan (64%)
	Kekerasan verbal terkait tuntutan kebutuhan tambahan	56%	Pelaporan 3 kasus kekerasan fisik ke RT dalam 4 bulan observasi
	Migrasi pekerja (suami/istri ke luar kota) tanpa koordinasi	32%	Disfungsi pengasuhan anak (28%)

## Dekonstruksi Tradisi: Sunatan dan Pernikahan yang Terkompresi

Ritual sosial yang selama ini berfungsi sebagai perekat kekerabatan mengalami dekomposisi sistematis. Sebanyak 84% partisipan (21 keluarga) menunda atau menyederhanakan acara sunatan dan pernikahan, dengan rata-rata penundaan 6-8 bulan. Observasi partisipatif mencatat perubahan signifikan dalam pola penyelenggaraan:

- Rasionalisasi menu: Paket nasi bungkus (Rp 15.000/pax) menggantikan prasmanan (Rp 75.000/pax)
- Minimalisasi undangan: Daftar tamu dipotong 70%, hanya menyertakan kerabat inti
- Substitusi ritual: Penggantian "pesta mandi" pada sunatan dengan doa sederhana

Seorang ibu (P7) yang membatalkan sunatan anaknya menjelaskan:

*"Acara anak ketiga kami batalkan. Tahun lalu saja biaya sunatan Rp 7 juta, sekarang hitungan catering naik 25%. Malu juga sama keluarga, tapi daripada utang ke rentenir..."*

Dampak sosialnya lebih dalam sekadar penghematan: 76% partisipan mengakui hilangnya kesempatan silaturahmi yang selama ini menjadi saluran dukungan ekonomi informal. Sebanyak 12 keluarga melaporkan berkurangnya bantuan spontan dari kerabat saat menghadapi kesulitan medis atau pendidikan.

## **Konflik Domestik: Anggaran sebagai Medan Pertempuran**

Tekanan ekonomi mengkristal dalam dinamika rumah tangga sebagai konflik struktural. Sebanyak 88% partisipan (22 keluarga) mengalami pertengkaran rutin terkait alokasi anggaran, dengan pola khas:

1. Fragmentasi prioritas: Perebutan sumber daya antara kebutuhan sekolah anak vs. pangan
2. Genderisasi beban: 64% ibu rumah tangga menjadi target tuntutan penyesuaian konsumsi
3. Erosi otoritas: Anak remaja (16-18 tahun) meninggalkan sekolah untuk kerja serabutan

Catatan lapangan menunjukkan peningkatan 40% frekuensi pertengkaran di malam hari setelah aktivitas belanja. Seorang bapak (P15) mengungkapkan dinamika rumit ini:

*"Istri marah terus karena saya pulang uang habis buat rokok. Tapi tekanan kerja jadi double, gimana tidak cari pelarian? Dulu seminggu sekali bisa makan di luar, sekarang sebulan tidak pernah..."*

Dalam empat kasus ekstrem, konflik memicu disintegrasi keluarga: tiga partisipan melaporkan perceraian tidak resmi (pisah ranjang tanpa prosedur hukum), dan dua remaja putus sekolah menjadi buruh kasar. Observasi di Posyandu Kelurahan Medan Marelan mencatat peningkatan 30% kasus gangguan kecemasan pada ibu rumah tangga selama periode penelitian.

## **Transformasi Jejaring Sosial: Dari Gotong Royong ke Transaksional**

Temuan paling mengkhawatirkan adalah komodifikasi hubungan sosial yang sebelumnya bersifat altruistik:

- Monetisasi bantuan: 52% partisipan mulai mematok "ongkos administrasi" untuk pinjaman antar-tetangga
- Fragmentasi kelompok: Arisan yang sebelumnya lintas kelas sosial kini tersegregasi berdasarkan strata ekonomi
- Erosi kepercayaan: 68% mengaku sulit membedakan niat tulus dan kepentingan ekonomi dalam interaksi

Dokumen autentik memperkuat temuan ini: catatan kas RT menunjukkan penurunan 45% partisipasi dalam kerja bakti, sementara arsip koperasi simpan pinjam mencatat peningkatan 120% tunggakan kredit mikro. Seperti dinyatakan tokoh masyarakat (P22):

*"Dulu kalau ada kenduri, semua datang bawa apa saja. Sekarang? Undangan saja tidak dibalas. Kami khawatir generasi muda tidak akan kenal budaya gotong royong..."*

Dampak sosial ini tidak hanya bersifat residual, tetapi membentuk lingkaran setan kerentanan: tekanan fiskal → konflik rumah tangga → disintegrasi sosial → penurunan kapasitas kolektif menghadapi krisis. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan kebijakan pajak yang memperhitungkan dimensi sosial-budaya, di mana efek domino pada kohesi masyarakat bisa lebih destruktif daripada dampak ekonomi langsung. Transformasi ini menjadi dasar untuk memahami tema berikutnya tentang persepsi keadilan fiskal.

## **Tema 3: Peran Aktor Non-Pemerintah**

Aktor non-pemerintah muncul sebagai *buffer* kritis dalam mitigasi dampak kenaikan PPN melalui inisiatif kolektif berbasis komunitas. Temuan mengungkapkan bahwa koperasi

UMKM dan jaringan keagamaan berperan sebagai *social safety net* alternatif, dengan pasar sembako murah mingguan sebagai mekanisme utama yang mengkompensasi distorsi harga akibat kebijakan fiskal.

**Tabel 4: Inisiatif Aktor Non-Pemerintah dalam Mitigasi Dampak PPN**

Aktor	Bentuk Intervensi	Cakupan Penerima	Efektivitas
Koperasi UMKM	Pasar sembako murah mingguan (diskon 15-25% dari pasar)	184 keluarga/minggu	Penghematan Rp 280.000/rumah tangga/bulan (72%)
	Skema kredit tanpa bunga untuk modal usaha (plafon Rp 2 juta)	28 pelaku UMKM	Peningkatan omset 18% pada sektor makanan pokok (60%)
Organisasi Keagamaan	Bantuan pangan bulanan (paket 10kg beras + minyak)	120 keluarga	Mengurangi alokasi belanja pangan 22% (84%)
	Dapur umum komunitas (3x/minggu)	90 anak sekolah	Penurunan angka absen sekolah 40% (76%)
Asosiasi Pedagang	Sistem pooling pembelian grosir antarpedagang	45 anggota	Tekan harga beli 12-18% (92%)
	Pelatihan diversifikasi produk (olahan pangan lokal)	31 peserta	Peningkatan pendapatan sampingan Rp 450.000/bulan (68%)

### Pasar Sembako Murah: Mekanisme Perlawanan Kolektif

Inisiatif koperasi UMPM "Berkah Mandiri" di Amplas menjadi model paling efektif melalui pasar mingguan bergerak yang menyediakan 9 bahan pokok dengan harga 15-25% di bawah pasar. Mekanisme operasionalnya melibatkan:

1. Sistem subsidi silang: Laba dari unit usaha air isi ulang (Rp 3.500/galon) mensubsidi sembako
2. Rantai pasok mandiri: Pembelian langsung dari petani di Deli Serdang (hilirkan 4 rantai distribusi)
3. Kriteria penerima: Kartu anggota dengan prioritas rumah tangga penyandang disabilitas dan lansia

Observasi selama 12 pekan menunjukkan transaksi rata-rata 184 keluarga per pasar dengan pola belanja dominan:

- Beras medium (5kg): Rp 48.500 vs pasar Rp 57.000
- Minyak goreng (2L): Rp 32.000 vs pasar Rp 38.500
- Gula pasir (1kg): Rp 12.300 vs pasar Rp 15.000

Seorang pengurus koperasi (P19) menjelaskan logika ekonominya:

*"Kami potong margin hanya 3%, cukup untuk operasional. Beli dari petani tanpa perantara, jual pakai sistem lotre waktu antrre biar adil. Yang tidak mampu bayar bisa ganti tenaga bongkar barang."*

### Efek Multiplier: Dari Bantuan Pangan ke Pemberdayaan

Intervensi non-pemerintah tidak hanya bersifat karitatif, tetapi membangun ekosistem ketahanan berlapis:

- Konversi bantuan ke modal: 32% penerima paket pangan keagamaan menjual sebagian untuk modal usaha mikro
- Integrasi pelatihan: Koperasi menyelenggarakan pelatihan pengolahan singkong menjadi tepung mocaf (60% bahan impor)
- Jaringan solidaritas digital: Grup WhatsApp "Sobat Semurah" memfasilitasi barter keterampilan (jasa servis → beras)

Dokumen keuangan UMKM menunjukkan dampak signifikan: peserta pelatihan diversifikasi produk mengalami peningkatan pendapatan rata-rata Rp 450.000/bulan melalui penjualan keripik ubi dan tepung lokal, mengurangi ketergantungan pada barang kena PPN.

Tantangan Keberlanjutan dan Fragmentasi

Meski efektif, inisiatif ini menghadapi paradoks kelembagaan:

Tantangan	Dampak Operasional	Frekuensi Kasus
Keterbatasan modal	Stok tidak kontinu (76% pasar minggu ke-3 kehabisan minyak goreng)	92%
Regulasi pemerintah	Kesulitan izin operasional pasar keliling (Pergub No. 23/2020)	64%
Fragmentasi jaringan	Tumpang tindih distribusi bantuan (3 keluarga dapat paket, 8 keluarga tidak dapat)	56%
Kelelahan relawan	Penurunan frekuensi dapur umum (dari 3x→1x/minggu dalam bulan ke-4)	48%



Seorang relawan (P25) mengungkapkan kompleksitas ini:

*"Bulan pertama semangat tinggi, donasi mengalir. Sekarang? Stok beras dari masjid sudah habis, relawan berkurang karena mereka juga butuh cari nafkah. Pemerintah malah razia pasar kami karena dianggap ganggu toko modern."*

## **Simbiosis Terbatas: Ketergantungan pada Ekosistem Lokal**

Temuan krusial mengungkap model simbiosis unik antara aktor non-pemerintah dan rumah tangga miskin:

- Pertahanan berbasis ruang: Pasar sembako bertahan di gang sempit ( $\leq 2m$ ) untuk hindari penertiban
- Ekonomi reputasi: Koperasi menggunakan sistem sanksi sosial (pengumuman di pengajian) untuk penagihan kredit
- Adaptasi teknologi: 44% transisi ke pre-order via WhatsApp untuk minimalisasi risiko operasional

Analisis catatan kas menunjukkan bahwa intervensi non-pemerintah berhasil mengurangi tekanan PPN sebesar 18-22% pada rumah tangga partisipan. Namun, efektivitasnya terkonsentrasi di wilayah dengan kepemimpinan komunitas kuat (Amplas), sementara di Medan Marelan yang fragmentasi sosialnya tinggi, cakupannya hanya 40%.

## **Diskusi Temuan**

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori beban pajak regresif (Saez & Zucman, 2019) di tingkat mikro: kenaikan PPN 11% di Kota Medan telah menciptakan tekanan tidak proporsional pada masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme substitusi barang pokok dan degradasi kualitas nutrisi. Sebanyak 92% rumah tangga mengganti beras premium dengan beras medium, sementara 76% mengurangi konsumsi daging sapi hingga 70%—pola yang selaras dengan temuan Caesaria et al. (2024) tentang penurunan daya beli masyarakat (hal. 11). Fenomena ini merefleksikan paradoks kebijakan fiskal di negara berkembang: meskipun PPN secara nominal bersifat proporsional, implementasinya dalam struktur ekonomi informal seperti Medan—di mana 46,3% pekerja bergantung pada sektor non-formal (BPS Kota Medan, 2023)—menghasilkan dampak ekuivalen yang regresif (Bird & Zolt, 2005, hal. 15).

Strategi adaptasi berbasis komunitas, seperti arisan sembako dan belanja kolektif, memperkuat konsep ketahanan keluarga ala Sen (1981). Mekanisme ini berhasil mengurangi tekanan fiskal sebesar 18-22% melalui penghematan kolektif, sebagaimana diidentifikasi dalam sistem transfer aset Phadera et al. (2019) (hal. 1). Namun, penelitian ini mengungkap kerentanan baru: 32% partisipan mengalami konflik internal dalam kelompok arisan akibat gagal bayar iuran, dan 56% melaporkan penurunan kepuasan konsumsi akibat substitusi tekstil non-merek. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adaptasi bukan sekadar respons rasional, melainkan negosiasi konstan antara survival dan martabat—sebuah dialektika yang tidak terungkap dalam studi makroekonomi sebelumnya (Fadillah et al., 2025; Qian, 2024).

Dampak sosial yang teramati, khususnya dekonstruksi acara keluarga (84% kasus) dan eskalasi konflik domestik (88%), mengkontekstualisasi peringatan Kouam dan Asongu (2022) bahwa

beban pajak tinggi menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk target pengurangan ketimpangan (hal. 8). Hilangnya fungsi silaturahmi dalam tradisi sunatan/pekerjaan tidak hanya mengurangi kohesi sosial, tetapi juga memutus saluran dukungan ekonomi informal—faktor kunci ketahanan komunitas miskin. Temuan ini selaras dengan studi Fitriani dan Susanti (2024) tentang tekanan psikologis akibat ketidakpastian ekonomi (hal. 4), namun penelitian ini mengungkap manifestasi ekstrem: tiga kasus perceraian tidak resmi dan peningkatan 30% gangguan kecemasan pada ibu rumah tangga di Posyandu.

Peran aktor non-pemerintah sebagai *buffer* fiskal—seperti pasar sembako murah koperasi (penghematan Rp 280.000/rumah tangga/bulan) dan dapur umum keagamaan—memvalidasi rekomendasi Fathoni (2025) tentang integrasi kebijakan pajak dengan perlindungan sosial (hal. 7). Efektivitas inisiatif ini (72% rumah tangga melaporkan pengurangan beban) menunjukkan kapasitas institusi lokal dalam membaca kerentanan spesifik yang tidak terjangkau kebijakan pusat. Namun, fragmentasi jaringan bantuan (56% kasus tumpang tindih distribusi) dan kendala regulasi (64% kesulitan izin pasar keliling) mengonfirmasi temuan Andreana dan Inayati (2022) tentang kelemahan transparansi dalam tata kelola pajak digital (hal. 2).

Implikasi teoritis yang muncul adalah perlunya rekontekstualisasi teori regresivitas pajak di negara berkembang. Temuan ini memperluas perspektif Saez dan Zucman (2019) dengan menunjukkan bahwa:

1. **Mekanisme kompensasi informal** (arisan, barter) dapat mengabsorpsi sebagian dampak regresif, tetapi berisiko mereproduksi ketimpangan baru
2. **Dimensi sosio-kultural** (erosi tradisi, komodifikasi hubungan sosial) merupakan dampak tersier yang tidak terukur dalam analisis fiskal konvensional
3. **Fragmentasi respons kebijakan** menciptakan *patchwork* ketahanan yang rentan kolaps. Sejalan dengan perspektif Bird dan Zolt (2005), keberlanjutan sistem pajak bergantung pada keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan distributif (hal. 15). Namun, konteks Medan menuntut penyesuaian: model "PPN inklusif" untuk ekonomi informal harus mengakomodasi tiga pilar—insentif UMKM spesifik lokasi (Fathoni, 2025, hal. 7), integrasi bantuan sosial berbasis komunitas, dan perlindungan ruang inovasi institusi lokal dari intervensi regulator berlebihan. Sebagaimana diingatkan Kartiko dan Firmansyah (2024), peningkatan kapasitas sistem pengembalian PPN (VAT refund) harus menjadi prioritas untuk menjembatani kesenjangan dengan praktik di Thailand dan Singapura (hal. 6).

Temuan ini sekaligus mengoreksi asumsi kebijakan selama ini: mekanisme adaptasi masyarakat bukan indikator ketahanan, melainkan sinyal *distress* sosio-ekonomi yang memerlukan intervensi terpadu. Pengurangan konsumsi protein hewani (76%) dan penundaan acara keluarga (84%) merupakan strategi *survival* jangka pendek yang berisiko menggerus modal manusia dan sosial generasi berikut—sebuah trade-off yang kontraproduktif dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan temuan studi kualitatif berbasis observasi partisipatif di Kota Medan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%

memperdalam kerentanan sosio-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui tiga jalur kritis. *Pertama*, terjadinya **rasionalisasi konsumsi dasar** berupa substitusi barang pokok (seperti pergantian beras premium ke medium dan protein hewani ke nabati) yang berdampak pada penurunan kualitas nutrisi dan potensi gangguan kesehatan. *Kedua*, **pemotongan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan** guna mengompensasi kenaikan belanja pokok, menggerus kapabilitas jangka panjang rumah tangga. *Ketiga*, meningkatnya **ketergantungan pada utang informal** (seperti arisan sembako dan pinjaman non-bank) yang berisiko memperburuk siklus kemiskinan. Temuan ini mengonfirmasi sifat regresif PPN dalam konteks urban Indonesia, di mana beban pajak yang secara nominal proporsional justru berdampak disproposional pada kelompok marjinal.

Implikasi kebijakan yang direkomendasikan meliputi: (1) Penerapan **skema *multiple-rate* PPN** dengan tarif lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok guna mengurangi distorsi konsumsi; (2) **Optimalisasi database penerima bantuan sosial berbasis pemetaan geospasial** untuk menjangkau kelompok rentan secara lebih akurat, mengatasi fragmentasi pendistribusian yang teridentifikasi di Medan Marelan; dan (3) **Pendampingan teknis UMKM** dalam membangun rantai pasok mandiri (misalnya via pembelian langsung dari petani) guna memitigasi efek kumulatif PPN pada harga input. Ketiga rekomendasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan target fiskal pemerintah dan perlindungan kelompok rentan.

Adapun keterbatasan studi terletak pada **konteks geografis yang spesifik** (perkotaan Medan), sehingga temuan tidak dapat sepenuhnya digeneralisasi ke wilayah lain tanpa adaptasi. Untuk penelitian lanjutan, diperlukan pendekatan ***mixed-methods*** guna memvalidasi temuan kualitatif melalui data kuantitatif representatif, sekaligus mengukur dampak makro kebijakan mitigasi yang diusulkan. Eksplorasi serupa di wilayah pedesaan atau kawasan ekonomi khusus juga disarankan untuk memperkaya analisis komparatif.

Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pajak tak hanya diukur dari kontribusi penerimaan, melainkan juga dari kemampuannya memelihara ketahanan sosio-ekonomi lapisan termasyarakat—sebuah paradigma fiskal yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreana, P., & Inayati, I. (2022). Principles of taxcollection in value added tax (VAT) on digital services in Indonesia. *Journal of Public Policy*,8(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4692>
- Asri, S. A. C., & Suseno, D. (2023). The effect of value-added tax policy on per capita income and inequality in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accounting Ventura*, 26(2). <https://doi.org/10.14414/jebav.v26i2.3526>
- Barrios, S., Coda Moscarola, F., Figari, F., Gandullia, L., & Riscado, S. (2020). The fiscal and equity impact of social tax expenditures in the EU. *Journal of European Social Policy*, 30(3). <https://doi.org/10.1177/0958928719891341>
- Browning, E. K. (1978). The burden of taxation. *Journal of Political Economy*, 86(4). <https://doi.org/10.1086/260703>

# MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 17 No 7 Tahun 2025

Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

- Caesaria, S. M., Mumpuni, Y. T., Mayasha, E., & Murti, G. T. (2024). Analysis of the impact and implications of the VAT rate increase in Indonesia. *Journal of Information System and Technology*, 5(7). <https://doi.org/10.59141/jist.v5i7.1150>
- Decoster, A., Loughrey, J., O'Donoghue, C., & Verwerft, D. (2010). How regressive are indirect taxes? A microsimulation analysis for five European countries. *Journal of Policy Analysis and Management*, 29(2). <https://doi.org/10.1002/pam.20494>
- Fadillah, L., Gunarto, M., & Helmi, S. (2025). Evaluating the impact of value-added tax on economic growth, inflation, unemployment, and consumer behaviour in developing countries: Evidence from Indonesia. *International Conference on Business, Economics, and Management*, 2(2). <https://doi.org/10.47747/icbem.v2i2.2615>
- Fathoni, M. I. (2025). Indonesia's value added tax (VAT) reform: Fiscal benefits and sectoral impacts. *Journal of Scientific Accounting*, 6(1). <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2039>
- Fitriani, K. L., & Susanti, F. (2024). DAMPAK KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(1). <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3169>
- Górecki, M., & Letki, N. (2020). Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large-scale survey experiment. *Journal of Business Ethics*, 167(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04502-8>
- Kartiko, N., & Firmansyah, A. (2024). Revisiting value-added tax structures: Strategies for mitigating regressivity in basic commodities consumption. *EDUcore: Journal of Education and Research*, 4(1). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i1.668>
- Kouam, J. C., & Asongu, S. (2022). Effects of taxation on social innovation and implications for achieving sustainable development goals in developing countries: A literature review. *International Journal of Innovation Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2022.08.002>
- Nasrudin, R., Hartono, D., Moeis, F., Pratama, A. P., Fadilla, R., & Effendi, R. (2022). THE POTENTIAL DISTRIBUTIONAL AND ECONOMIC WIDE IMPACT OF THE NEW INDONESIA'S VAT LAW IMPLEMENTATION. Park, H., Lee, J., & Shin, J. (2023). How does taxation affect corporate social responsibility? Evidence from a Korean tax reform. *Journal of Business Ethics*, 187(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05536-4>
- Phadera, L., Michelson, H., Winter-Nelson, A., & Goldsmith, P. (2019). Do asset transfers build household resilience? *Journal of Development Economics*, 138. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.01.003>
- Putra, O. J. (2024). Value added tax: A suitable alternative for taxing the digital economy? (Indonesian context). *Journal of Policy and*